

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman merupakan peran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Sapol PP Kabupaten Sleman. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman berwenang dalam mengatur pajak parkir, mengatur retribusi tempat khusus parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara perizinan perparkiran.

Penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, kapasitas dan kompetensi penegak hukum dan infrastruktur. Sedangkan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitasnya seperti keterbatasan sumber daya alam, kurangnya infrastruktur Parkir, kesadaran masyarakat yang rendah, penegakan hukum yang lemah, faktor ekonomi dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi lembaga terkait :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman perlu lebih mengidentifikasi lagi pembinaan kepada juru parkir dan pengelola tempat parkir. Adapun penekanan yang lebih pada hak dan kewajiban sebagai juru parkir dan pengelolaan tempat khusus parkir dan melakukan pencegahan lebih rutin agar pengelolaan parkir yang belum melakukan izin dapat diberikan edukasi dan arahan. Sebaiknya, petugas Satpol PP Kabupaten Sleman dapat diberikan anggota yang lebih memadai, sehingga bisa membantu pelaksanaan pencegahan praktik parkir liar.
 - b. Untuk mengoptimalkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman perlu meningkatkan sosialisasi peraturan parkir dan sanksi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman juga perlu melakukan edukasi berkelanjutan mengenai dampak negatif parkir liar dan memberi penghargaan atau insentif bagi warga yang aktif melaporkan parkir liar. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman juga dapat membentuk forum koordinasi rutin antara dinas perhubungan dan Satpol PP untuk membahas dan menyelesaikan masalah parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brotodiharjo, R.S. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Martokusumo, Dikno . 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Liberty.
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia*. Malang : UB Press.
- Purnomo, Rochmat Aldy dan Dhutarso Aviantoro. 2023. *Digital Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shant, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Departemen Kehutanan.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada,
- Soebechi, D. H. 2013. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. JakartaTimur: Sinar Grafika.
- Soebechi, Imam. 2013. *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi

- Ifon Suhaini, 2022, *Analisis Mekanisme Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal

Yanto, Ahmad Janur. 2020. “ Kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir: studi di kecamatan kaliwates Kabupaten Jember”. *Jurnal Muhammadiyah Jember*. Vol.2 No. 1, hlm. 33.

Sari, Meri Enita Puspita. 2018. “Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik”. *Jurnal Trias Politika, Vol 2.No.1 : 1-12, hlm. 4.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran Lembar Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri B

Media Massa Elektronik

Ahmad Syarifudin, “Masa Liburan, Pergerakan Kendaraan Keluar-Masuk di Sleman Melonjak, TribunJogja.Com”, <https://jogja.tribunnews.com/2023/12/26/masa-liburan-pergerakan-kendaraan-keluar-masuk-di-sleman-melonjak?page=all>, diakses 28 Maret 2024.

Almaidha Sitompul, Sanksi Hukum Bagi Hukum Parkir Liar, <https://www.inilah.com/sanksi-pasal-hukum-undang-undang-tukang-parkir>, diakses 16 Maret 2024.

Annisa, “Penegak Hukum: Pengertian Faktor dan Tahapnya”, Fahum Umsu, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>, diakses 16 Maret 2024.

Cindy Mutia Annur, “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga pertengahan 2023”, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>, diakses 28

CNN Indonesia, “Memahami kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231011110114-569-1009787/memahami-kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah-di-indonesia>, diakses 20 Maret 2024.

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Transportasi Dalam Angka”, hlm. 18, <https://dishub.jogjaprovo.go.id/files/114/Transportasi-Dalam-Angka/296/Transportasi-Dalam-Angka-2022.pdf>, diakses 28 Maret 2024.

Harianjogja.com, *Cegah Nuthuk Tarif Parkir, Dishub Sleman Minta Warga Bayar Pakai Uang Pas*

,<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/11/512/1157841/cegah-nuthuk-tarif-parkir-dishub-sleman-minta-warga-bayar-pakai-uang-pas>, diakses 23 April 2024.

Jauh Hari Wawan S, “Menelusuri Seturan dan Babarsari, Kawasan Metropolitan SCBD Sleman”, Detik.com, <https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7064010/menelusuri-seturan-dan-babarsari-kawasan-metropolitan-scbd-sleman>, diakses 13 Maret 2024.

Maret 2024.

Putu Gyan, Perbedaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir, <https://www.pajakku.com/read/63da35b5b577d80e80ccbe0e/Perbedaan-Pajak-Parkir-dan-Retribusi-Parkir->, diakses 16 Maret 2024

TribunJogja.Com, Masa Liburan, Pergerakan Kendaraan Keluar-Masuk di Sleman Melonjak, <https://jogja.tribunnews.com/2023/12/26/masa-liburan-pergerakan-kendaraan-keluar-masuk-di-sleman-melonjak?page=all>, diakses 28 Maret 2024

Slemankab.go.id, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, <https://slemankab.go.id/archive/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/kelembagaan/>, diakses 20 juni 2024.

LAMPIRAN



Gambar 1 Foto di Dinas Perhubungan Sleman



Gambar 2 Foto bersama Satpol PP Kabupaten Sleman



Gambar 3 Foto di Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta

